BAB I
PENDAHULUAN

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan yang disusun secara periodik. Dinas Pengendalian Peduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya menyajikan Laporan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah (PD) yang merupakan realisasi tahunan dari Renstra PD Tahun 2016 – 2021.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerjapada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah :

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

1.1. Gambaran Umum Organisasi

Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.

Berdasarkan pasal 4 Prtauran Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Penyelenggaraan SAKIP pada Perangkat Daerah dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah (PD). Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai salah satu entitas Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya Tahun 2017 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang mencerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi realisasi pencapaian indicator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang dijabarkan dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kota Surabaya memiliki kewenangan di bidang pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dimaksud, Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:

1. Sekretariat, membawahi:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Keuangan.
2. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi:
   a. Seksi Pembinaan Pemberdayaan Perempuan;
   b. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Peran Aktif Perempuan.
3. Bidang Kesejahteraan Keluarga, membawahi:
   a. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
   b. Seksi Ketahanan Keluarga.
4. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, membawahi:
   a. Seksi Keluarga Berencana;
   b. Seksi Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE);
5. Bidang Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahi:
   a. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;

b. Seksi Pengarusutamaan Hak Anak.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SURABAYA

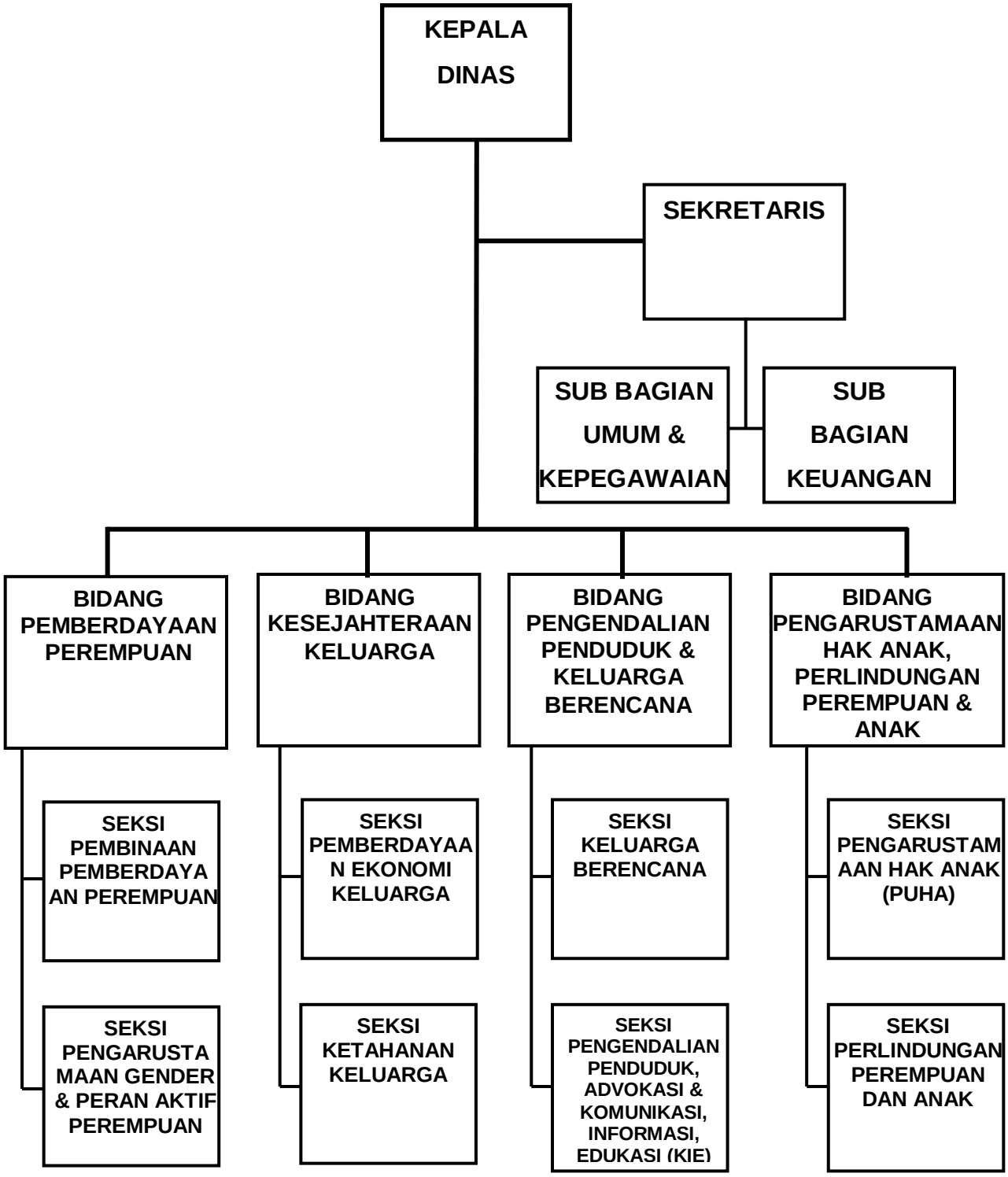

Untuk menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya didukung oleh personil sebagai berikut:

NO	NAMA BAGIAN / BIDANG	ESELON	STAF
1	Sekretariat	4	8
2	Pemberdayaan Perempuan	3	4
3	Kesejahteraan Keluarga	3	4
4	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3	7
5	Pengarustamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak	3	3
JUMLAH		16	26
TOTAL PNS		42	

Selain personil PNS dari Pemerintah Kota Surabaya, dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didukung oleh Tenaga Fungsional yang berstatus PNS dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebanyak 60 personil berdasar data bulan Desember tahun 2018

1.3. Permasalahan Utama (strategic issued)

Dari evaluasi terhadap kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya, masih ditemukan permasalahan utama yang harus diselesaikan dalam rangka pembangunan Milenium berdasarkan pada MDGs. Semua negara yang hadir dalam pertemuan tersebut berkomitmen untuk mengintegrasikan MDGs sebagai bagian dari program pembangunan nasional dalam upaya menangani penyelesaian terkait dengan isu-isu yang sangat mendasar tentang pemenuhan hak asasi dan kebebasan manusia, perdamaian, keamanan, dan pembangunan. Evaluasi ini bertujuan untuk menyelesaikan

isu-isu yang sangat mendasar sebagaiman yang terlampir pada kalimat diatas, adapun permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Masih banyaknya masyarakat yang berpendapatan rendah sehingga perlu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan perempuan
2. Belum meratanya kualitas dan kurangnya kuantitas sumber daya aparatur pendukungnya, antara lain ketersediaan regulasi, sistem pengarsipan, dan sebagainya.
3. Masih belum optimalnya upaya perlindungan perempuan dan anak.
4. Belum terwujudnya salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup masayarakat adalah dengan mewujudkan penduduk yang tumbuh seimbang dengan melakukan pengendalian kualitas penduduk melalui keluarga berencana.

1.4. Sistematika Penyusunan

Sedangkan Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya Tahun 2018 ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapiorganisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjajian kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusiyang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realiasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Secara formal sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan agar setiap Instansi pemerintah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis (strategic planning). Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai salah satu Perangkat Daerah, melalui perencanaan strategis diharapakan memiliki peran sentral dalam pelaksanaan pemerintahan.

Perencanaan strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2016-2021 disusun dalam rangka untuk mewujudkan visi dan misi Kota Surabaya sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2016-2021. Untuk mewujudkan hal tersebut dirumuskan visi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu ”**Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas dan Berdaya dengan Dukungan Lembaga Berbasis Masyarakat”** dengan penjelasan visi sebagai berikut:

1. Pokok visi ”Pemberdayaan” penjelasan visinya adalah Keluarga yang berdaya adalah keluarga yang mampu memanfaatkan semua potensi kekuatan yang ada di dalam dirinya dan di sekitarnya. Kekuatan itu dimanfaatkan untuk membuat mereka tidak bergantung kepada orang lain. Keluarga berdaya adalah Keluarga yang mampu memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya sebagai wahana untuk menghasilkan produk dan jasa yang menghasilkan manfaat sosial dan ekonomi. keluarga berdaya akan mengubah sumber daya alam sehingga memiliki nilai tambah. Keluarga berdaya adalah masyarakat yang memiliki perilaku hidup dan modal sosial yang positif. Keluarga berdaya adalah keluarga yang menyadari arti penting pendidikan, nilai hidup sehat, kepatuhan terhadap hukum, keharusan untuk terus bekerja atau

berwirausaha serta menjaga kelestarian lingkungan. Keluarga berdaya adalah keluarga yang memahami kegunaan semangat kebersamaan dalam membangun keluarga yang bahagia.

2. Pokok visi ”Keluarga” penjelasan visinya adalah keluarga yang berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Pokok visi ”Lembaga” penjelasan visinya adalah Dukungan lembaga berbasis masyarakat yang dilaksanakan oleh dari dan untuk masyarakat.

2.2. Pernyataan Misi

Dalam Rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 3 (tiga) misi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan KB serta pembinaan ketahanan keluarga;
2. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga dan pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.

2.3. Tujuan dan Sasaran

Untuk mencapai visi dan misi, maka Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah :

1. Meningkatnya kualitas layanan KB dasar
2. Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik
3. Memberdayakan PMKS usia produktif untuk mandiri

4. Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif
5. Meningkatkan pemberdayaan perempuan
6. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak

Tabel Hubungan antara Misi dan Tujuan

MISI	TUJUAN	INDIKATOR
Meningkatkan kualitas pelayanan KB serta pembinaan ketahanan keluarga	Meningkatnya kualitas layanan KB dasar	Total Fertility Rate (TFR)
	Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik	Indeks Kepuasan SKPD terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran
		Tingkat Capaian Keberhasilan Pelaksanaan Program
		Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan
Meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga	Memberdayakan PMKS usia produktif untuk mandiri	Persentase PMKS usia produktif yang omzetnya ≥ 1 juta rupiah per bulan
	Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif	Tingkat pertumbuhan pelaku usaha kreatif
Meningkatkan pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Meningkatkan pemberdayaan perempuan	Persentase kecamatan yang responsif gender
	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Persentase kelurahan ramah anak

Mengacu kepada visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan permasalahan yang tengah dihadapi serta berupaya mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan untuk melaksanakan Misi dan tujuannya yang

didukung oleh program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan
2. Meningkatnya upaya perlindungan perempuan dan anak
3. Meningkatnya kualitas pelayanan KB
4. Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah
5. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan program
6. Meningkatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat
7. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Tabel Hubungan antara Tujuan dan Sasaran

TUJUAN		SASARAN	
URAIAN	**INDIKATOR**	**URAIAN**	**INDIKATOR**
Meningkatnya kualitas layanan KB dasar	Total Fertility Rate (TFR)	Meningkatnya kualitas pelayanan KB	Persentase terlaksananya pelayanan KB Kontrasepsi Mantap
Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik	Indeks Kepuasan SKPD terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah	Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah
	Tingkat Capaian Keberhasilan Pelaksanaan Program	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan Program	Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan
	Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan		
Memberdayakan PMKS usia produktif untuk mandiri	Persentase PMKS usia produktif yang omzetnya ≥ 1 juta rupiah per bulan	Meningkatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat	Persentase jumlah PMKS yang telah melakukan usaha ekonomi produktif

Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif	Tingkat pertumbuhan pelaku usaha kreatif	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti aktifitas pengembangan usaha di rumah kreatif
Meningkatkan pemberdayaan perempuan	Persentase kecamatan yang responsif gender	Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan	Persentase Kecamatan yang belum Responsif Gender
Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Persentase kelurahan ramah anak	Meningkatnya upaya perlindungan perempuan dan anak	Persentase tindak lanjut permasalahan perempuan dan anak

2.4. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Walikota Surabaya Kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang pada akhir tahun digunakan dasar bagi pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi. Artinya pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama, Target Kinerja dan Capaian Kinerja. Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2018 yang akan diukur merupakan indikator tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan pada rencana strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Uraian tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja tahun 2018 merupakan Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2018 yang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	**Tujuan:**		
	Meningkatnya kualitas layanan KB dasar	Total Fertility Rate (TFR)	1.8-1.9
	Sasaran:		
	Meningkatnya kualitas layanan KB	Persentase terlaksananya pelayanan KB Kontrasepsi Mantap	100%
2	**Tujuan:**		
	Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik	Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	64%
		Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program	91.53%
		Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan	77%
	Sasaran:		
	Mengelola sarana dan parasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah	Kinerja pengelolaan sarana, prasarana, dan administrasi perkantoran perangkat daerah	100%
	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan program	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter perencanaan pada operational plan	100%
3	**Tujuan:**		
	Memberdayakan PMKS usia produktif untuk mandiri	Persentase PMKS usia produktif yang omzetnya ≥ 1 juta rupiah per bulan	80%
	Sasaran:		
	Meningkatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat	Persentase jumlah PMKS yang telah melakukan usaha ekonomi produktif	10%
4	**Tujuan:**		
	Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif	Tingkat pertumbuhan pelaku usaha kreatif	0.25%
	Sasaran:		
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti aktifitas pengembangan usaha di rumah kreatif	25%
5	**Tujuan:**		
	Meningkatkan pemberdayaan	Persentase kecamatan yang responsif gender	61.29%

	perempuan		
	Sasaran:		
	Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan	Persentase Kecamatan yang belum Responsif Gender	38.71%
6	**Tujuan:**		
	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Persentase kelurahan ramah anak	51.95%
	Sasaran:		
	Meningkatnya upaya perlindungan perempuan dan anak	Persentase tindak lanjut permasalahan perempuan dan anak	100.00%

Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yaitu indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Artinya pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2018 yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE (2015)	TARGET					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Total Fertility Rate (TFR)	1,81	1,80-1,9	1,80-1,9	1,80-1,9	1,80-1,9	1,80-1,9	1,80-1,9
2	Persentase PMKS usia produktif yang omzetnya ≥ 1 juta rupiah per bulan	43,23%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
3	Persentase Kecamatan yang responsive gender	19,35%	35,48%	48,39%	61,29%	74,19%	87,10%	100%
4	Persentase Kelurahan ramah anak	3,25%	19,48%	35,71%	51,95%	68,18%	84,42%	100%

Untuk mencapai target kinerja tahun 2018 yang sudah ditetapkan dalam RENSTRA, maka Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyusun program-program sebagai berikut:

1. Program Keluarga Berencana
2. Program Bina Keluarga
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan
5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
7. Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif
8. Program Perlindungan Perempuan dan Anak
9. Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Pelaksanaan program pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didukung dana yang bersumber dari APBD Kota Surabaya serta APBN, daya dukung inilah yang menguatkan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja seluruh program dari Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), dan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pertanggungjawaban kinerja sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan alat ukurnya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

Laporan Kinerja adalah tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Selain itu untuk mengukur capaian kinerja masing-masing tujuan dan sasaran dengan membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada), melakukan analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkan atau penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, melakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1.1. Pencapaian Kinerja Tujuan

Capaian kinerja Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota surabaya tahun 2018 berdasarkan pada data di Monev2018 untuk setiap tujuan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel Pencapaian Kinerja Tujuan

Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas layanan KB dasar	Total Fertility Rate (TFR)	1.80 – 1.9	1.73	103,83%
Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik	Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan parasarana perkantoran	64.00%	85,12%	133.00%
	Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program	91,53%	100.00%	109,25%
	Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan	77.00%	86.35%	112,14%
Memberdayakan PMKS usia produktif untuk mandiri	persentase PMKS usia produktif yang omzetnya ≥ 1 juta rupiah per bulan	80.00%	59,70%	74,62%
Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif	Tingkat pertumbuhan pelaku usaha kreatif	0.25%	1.25%	500.00%
Meningkatkan pemberdayaan perempuan	Persentase kecamatan yang responsif gender	61,29%	61,29%	100.00%
Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Persentase Kelurahan Ramah Anak	51,95%	52,60%	101,25%

Tujuan meningkatnya kualitas layanan KB dasar dengan indikator kinerja Total Fertility Rate (TFR), besar target 1.80-1.9 dan realisasinya 1.73 (E-monev2018) Realisasi 1.73 dibandingkan dengan target, maka angka kelahiran total di Kota Surabaya tergolong rendah atau melampaui target yang telah ditentukan, dengan capaian 103,83%.

Tujuan meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik dengan indikator kinerja Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan parasarana perkantoran, besar target yang harus dicapai adalah 64,00% dan realisasinya didapat melalui survei sebesar 85,12% dengan capaian 133.00% Indikator kinerja lainnya adalah tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program, besar target 91,53% dan realisasinya dengan melihat capaian indikator program adalah 100.00% dengan capaian

109,25%, Indikator kinerja terakhir untuk tujuan meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik adalah tingkat kepuasan pelayanan kedinasan, besar target yang harus dicapai adalah 77,00% dan realisasinya adalah 86,35 % dengan capaian 112,14%

Tujuan memberdayakan PMKS usia produktif untuk mandiri mempunyai inkator kinerja persentase PMKS usia produktif yang omzetnya ≥ 1 juta rupiah per bulan, cara mengukur indikator kinerja tujuan ini dengan perhitungan jumlah PMKS usia produktif yang omzetnya ≥ 1 juta rupiah per bulan sampai dengan tahun t dibagi jumlah PMKS usia produktif dari hasil pelatihan atau pembinaan yang berproduksi sampai dengan tahun t x 100%. Target kinerja yang ditetapkan tahun 2018 adalah 80%, maka besar realisasi dengan perhitungan tersebut adalah 59,70% atau dengan capaian 74,62%. Beberapa hal yang mempengaruhi tidak tercapainya target yang sudah ditentukan atau peserta pelatihan tidak melakukan produksi setelah mendapatkan pelatihan adalah:

1. Peserta banyak yang memilih tetap melanjutkan bekerja di pabrik / di toko
2. Peserta memilih bekerja sebagai babysitter (pengasuh bayi)
3. Peserta kembali bekerja sebagai guru / bunda PAUD
4. Peserta dilarang oleh suaminya
5. Lebih memilih untuk mengasuh anak / cucu
6. Peserta sakit / hamil
7. Peserta tidak berminat lagi (orientasi pada bantuan modal)

Tujuan meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif mempunyai indikator kinerja tingkat pertumbuhan pelaku usaha kreatif, formulasi pengukuran indikator kinerja jumlah pelaku usaha kreatif tahun (t) - Jumlah Pelaku Usaha Kreatif tahun (t0)] / Jumlah Pelaku Usaha Kreatif tahun (t0) x 100%. Tahun 2018 target kinerja 0,25%, maka besar realisasi dengan perhitungan tersebut adalah 1,25% atau dengan capaian 500,00%.

Tujuan meningkatkan pemberdayaan perempuan mempunyai indikator kinerja persentase kecamatan yang responsif gender, formulasi pengukuran indikator kinerja yaitu jumlah kecamatan yang responsif gender sampai dengan tahun t / jumlah kecamatan x 100%. Target indikator kinerja 61,29%, maka sampai dengan tahun 2018 kecamatan responsif gender sebanyak 19

kecamatan berdasar akumulasi tahun 2017 ditambah tahun 2018(Monev2018) yaitu:

1. Tandes
2. Rungkut
3. Semampir
4. Jambangan
5. Simokerto
6. Wiyung
7. Benowo
8. Wonokromo
9. Asemrowo
10. Wonocolo
11. Tenggilis Mejoyo
12. Tegalsari
13. Sawahan
14. Tambaksari
15. Pabean Cantian
16. Bubutan
17. Gunung anyar
18. Krembangan
19. Gubeng

Capaian kecamatan responsif gender 19 kecamatan dibanding dengan jumlah seluruh kecamatan (31 Kecamatan) maka realisasinya adalah 61,29% atau dengan capaian 100%.

Tujuan meningkatkan perlindungan perempuan dan anak mempunyai indikator kinerja persentase Kelurahan Ramah Anak, formulasi pengukuran indikator kinerja yaitu jumlah Kelurahan Ramah Anak sampai dengan tahun t / jumlah Kelurahan x 100%. Target indikator kinerja 51,95%, maka sampai dengan tahun 2018 Kelurahan Ramah Anak sebanyak 81 Kelurahan yaitu:

1. Darmo
2. Wonorejo (Timur)
3. Wonorejo (Pusat)
4. Kutisari
5. Kebraon
6. Kendangsari
7. Rungkut Kidul
8. Baratajaya
9. Jambangan
10. Wonokusumo
11. Babatan

12. Kedungdoro
13. Wonokromo
14. Nginden Jangkungan
15. Nginden Jangkungan
16. Bubutan
17. Gunung Anyar Tambak
18. Kedurus
19. Margorejo
20. Tembok Dukuh
21. Dupak
22. Kapas Madya Baru
23. Dukuh Menanggal
24. Rungkut Kidul
25. Semolowaru
26. Karah
27. Genteng
28. Siwalankerto
29. Sawunggaling
30. perak utara
31. Kandangan
32. Ngagel Rejo
33. Perak Barat
34. Dukuh Setro
35. Karang Pilang
36. Gayungan
37. Pagesangan
38. Manyar Sabrangan
39. Bulak
40. Kertajaya
41. Mojo
42. Babat Jerawat
43. Kebraon
44. Sidodadi
45. Manukan Wetan

46. Penjaringansari
47. Dukuh Sutorejo
48. Balas Klumprik
49. Kebonsari
50. Dukuh Kupang
51. Sambikerep
52. Balas Klumprik
53. Gunungsari
54. Kalisari
55. Karang Poh
56. Asemrowo
57. Lontar
58. Kalijudan
59. Rungkut Menanggal
60. Jepara
61. Lakarsantri
62. Waru Gunung
63. Simomulyo
64. Kedung Baruk
65. Bendul Merisi
66. Banjarsugihan
67. Menanggal
68. Ngagel
69. Kalirungkut
70. Sidotopo Wetan
71. Sidosermo
72. Keputran
73. Nginden Jangkungan
74. Bulak Banteng
75. Genting Kalianak
76. Banyu Urip
77. Tambak Sarioso
78. Petemon
79. Putat Jaya

80. Rangkah
81. Gubeng

Capaian Kelurahan ramah anak 81 kelurahan dibanding dengan jumlah seluruh kelurahan (154 Kelurahan) maka realisasinya adalah 52,60% atau dengan capaian 101,25%.

3.1.2. Pencapaian Kinerja Sasaran

Capaian kinerja Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya tahun 2018 dijelaskan di realisasi sasaran monev2018, untuk setiap sasaran dari masing-masing tujuan dijelaskan sebagai berikut:

Tujuan : 1. Meningkatnya kualitas layanan KB dasar

Sasaran : 1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan KB

Tabel Pencapaian Kinerja Tujuan 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas pelayanan KB	Persentase terlaksananya pelayanan KB Kontrasepsi mantap	100%	87,63%	87,63%

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 1.1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kualitas pelayanan KB	Persentase terlaksananya pelayanan KB Kontrasepsi mantap	100%	96,70%	106,34%	95,86%	87,63%

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan KB dari tujuan meningkatnya kualitas layanan KB dasar, memiliki indikator kinerja persentase terlaksananya pelayanan KB kontrasepsi mantap, dengan target 100% maka formulasi perhitungannya adalah (Jumlah Akseptor KB Baru Kontrasepsi Mantap : Jumlah Target Akseptor KB Kontrasepsi Mantap) x 100%. Tahun 2018 realisasi dari target adalah sebesar 87,63% atau dengan capaian 87,63%. Capaian tahun 2018 apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya

mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2017 dan tahun 2016.

Tujuan : 2. Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik

Sasaran : 2.1. Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah

2.2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan program

Tabel Pencapaian Kinerja Tujuan 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah	Kinerja pengelolaan sarana, prasarana, dan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	100,00%	93,87%	93,87%
Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan program	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter perencanaan pada operational plan	100,00%	100,00%	100,00%

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 2.1 dan 2.2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	2	3	4	5	6	7
Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah	Kinerja pengelolaan sarana, prasarana, dan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	93,73%	93,87%
Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan program	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter perencanaan pada operational plan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Tujuan Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik memiliki 2 sasaran yaitu:

1. Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah, memiliki indikator kinerja pengelolaan sarana,

prasarana, dan administrasi perkantoran Perangkat Daerah, dengan target kinerja 100% dan formulasi perhitungannya adalah (capaian indikator “persentase sarana dan parasarana perkantoran dalam kondisi baik”)x50% + (capaian indicator “tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran”)x50%. Realisasi tahun 2018 adalah 93,87% dengan capaian 93,87%.

2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan program, memiliki indikator kinerja Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter perencanaan pada operational plan, dengan target kinerja100% dan formulasi perhitungannya adalah rumus rata-rata persentase capaian kinerja operational plan pada aspek what (60%) dan when (40%) = (Capaian what pada sub (i) * 0,6) + (Capaian when pada sub (i) * 0,4) 2. Rumus capaian what pada sub (i) = realisasi output sub : target output sub rencana 3. rumus capaian when pada sub (i) = (realisasi : target) sub pada bulan yang terdapat output rencana. Realisasi tahun 2018 adalah 100,00% dengan capaian 100,00%.

Tujuan : 3. Memberdayakan PMKS usia produktif untuk mandiri

Sasaran : 3.1. Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Tabel Pencapaian Kinerja Tujuan 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Persentase jumlah PMKS yang telah melakukan usaha ekonomi produktif	10,00%	72,20%	721,98%

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 3.1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Persentase jumlah PMKS yang telah melakukan usaha ekonomi produktif	10,00%	0,00%	10,22%	10,00%	721,98%

Sasaran meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dari tujuan memberdayakan PMKS usia produktif untuk mandiri, memiliki indikator kinerja

Persentase jumlah PMKS yang telah melakukan usaha ekonomi produktif, dengan target 10,00% maka formulasi perhitungannya adalah (Jumlah PMKS yang telah melakukan usaha ekonomi produktif : Jumlah PMKS yang telah dibina) x 100%. Maka realisasi dari target pada tahun 2018 adalah sebesar 72,20% atau dengan capaian 721,98%. Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maka tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 mengalami peningkatan.

Tujuan : 4. Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif

Sasaran : 4.1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Tabel Pencapaian Kinerja Tujuan 4

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti aktifitas pengembangan usaha di rumah kreatif	25,00%	99,36%	397,45%

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 4.1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti aktifitas pengembangan usaha di rumah kreatif	25,00%	0%	0%	100,00%	99,36%

Sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dari tujuan Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif, memiliki indikator kinerja Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti aktifitas pengembangan usaha di rumah kreatif, dengan target 25,00% maka formulasi perhitungannya adalah (Jumlah masyarakat yang mengikuti aktifitas pengembangan usaha di rumah kreatif : Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi) x 100%. Tahun 2018 maka realisasi dari target adalah sebesar 99,36 % atau dengan capaian 397,45%. Hal ini dikarenakan Rumah kreatif merupakan program baru dari Pemerintah Kota Surabaya pada RPJMD 2016-2021

Tujuan : 5. Meningkatkan pemberdayaan perempuan

Sasaran : 5.1. Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan

Tabel Pencapaian Kinerja Tujuan 5

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan	Persentase Kecamatan yang belum Responsif Gender	38,71%	38,71%	100,00%

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 5.1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan	Persentase Kecamatan yang belum Responsif Gender	38,71%	0,00%	64,52%	51,61%	38,71%

Sasaran meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dari tujuan meningkatkan pemberdayaan perempuan, memiliki indikator kinerja Persentase Kecamatan yang belum Responsif Gender, dengan target 38,71% maka formulasi perhitungannya adalah (Jumlah kecamatan yang belum responsif gender sampai dengan tahun t : Jumlah Kecamatan) x 100%. Tahun 2018 maka realisasi dari target adalah sebesar 38,71 % atau dengan capaian 100,00%. Capaian tahun 2018 apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya realisasi tahun 2018 lebih rendah apabila dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2016, hal ini menunjukkan bahwa tahun 2018 Kecamatan yang Responsif Gender lebih banyak daripada tahun 2017 dan 2016.

Tujuan : 6. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak

Sasaran : 6.1. Meningkatnya upaya perlindungan perempuan dan anak

Tabel Pencapaian Kinerja Tujuan 6

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatnya upaya perlindungan perempuan dan anak	Persentase tindak lanjut permasalahan perempuan dan anak	100,00%	100,00%	100,00%

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 6.1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
			Tahun	Tahun	Tahun	Tahun

			2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya upaya perlindungan perempuan dan anak	Persentase tindak lanjut permasalahan perempuan dan anak	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sasaran meningkatnya upaya perlindungan perempuan dan anak dari tujuan meningkatkan perlindungan perempuan dan anak, memiliki indikator kinerja Persentase tindak lanjut permasalahan perempuan dan anak, dengan target 100% maka formulasi perhitungannya adalah (jumlah permasalahan perempuan dan anak yang ditindaklanjuti : Jumlah permasalahan perempuan dan anak yang dilaporkan) x 100%. Tahun 2018 maka realisasi dari target adalah sebesar 100% atau dengan capaian 100%. Capaian tahun 2018 apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, capaian tahun 2018 masih sama dengan capaian 2015 sampai 2017

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Periode Akhir Renstra

Capaian kinerja Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya tahun 2018 untuk setiap sasaran apabila dibandingkan dengan target Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir periode RENSTRA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas pelayanan KB	Persentase terlaksananya pelayanan KB Kontrasepsi mantap	100,00%	87,63%	87,63%
Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah	Kinerja pengelolaan sarana, prasarana, dan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	100,00%	93,87%	93,87%
Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan program	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter perencanaan pada operational plan	100,00%	100,00%	100,00%
Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Persentase jumlah PMKS yang telah melakukan usaha ekonomi produktif	10,00%	72,20%	721,98%

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti aktifitas pengembangan usaha di rumah kreatif	25,00%	99,36%	397,45%
Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan	Persentase Kecamatan yang belum Responsif Gender	0,00%	38,71%	61,29%
Meningkatnya upaya perlindungan perempuan dan anak	Persentase tindak lanjut permasalahan perempuan dan anak	100,00%	100,00%	100,00%

Hampir semua target sasaran menggunakan target tahunan, kecuali sasaran Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan menggunakan target yang diakumulasi selama 5 tahun. Realisasi target sasaran terhadap Renstra hampir keseluruhan mencapai target yang di tentukan kecuali target sasaran Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan karena indikator yang digunakan adalah Persentase Kecamatan yang belum Responsif Gender sehingga setiap tahun diharapkan capaian realisasi semakin mengecil dan pada akhir tahun Renstra realisasinya adalah 0,00%.

3.2. Realisasi Anggaran

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja tidak bisa lepas dari dukungan anggaran yang disediakan. Pada tahun 2018, Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memperoleh dana dari APBD Kota Surabaya dan APBN baik berupa belanja rutin maupun belanja pembangunan dengan tujuan agar anggaran yang tersedia dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan (total penjumlahan anggaran tiap program kegiatan yang ada pada sasaran : anggaran total belanja di e-budgeting) x 100. Adapun alokasi keuangan per sasaran pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No	Sasaran Stategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1	Meningkatnya kualitas pelayanan KB	Persentase terlaksananya pelayanan KB Kontrasepsi mantap	10.140.788.276	34.52%

2	Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah	Kinerja pengelolaan sarana, prasarana, dan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	4.433.187.228	15,09%
3	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan program	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter perencanaan pada operational plan	207.565.555	0.70%
4	Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Persentase jumlah PMKS yang telah melakukan usaha ekonomi produktif	6.336.960.650	21,57%
5	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti aktifitas pengembangan usaha di rumah kreatif	510.919.120	1,73%
6	Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan	Persentase Kecamatan yang belum Responsif Gender	2.429.081.417	8,27%
7	Meningkatnya upaya perlindungan perempuan dan anak	Persentase tindak lanjut permasalahan perempuan dan anak	5.311.361.696	18,08%

Pada tahun 2018 semua sasaran memiliki anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan indikator kinerja persentase jumlah masyarakat yang mengikuti aktifitas pengembangan usaha di rumah kreatif memiliki anggaran yang kecil, karena sasaran ini dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah dengan Sharing target kinerja.

Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian (realisasi : alokasi) *100
Sasaran 1							
Meningkatnya kualitas pelayanan KB	Persentase terlaksananya pelayanan KB Kontrasepsi mantap	100,00%	87,63%	87,63%	10.140.788.276	7.354.875.140	72,52%
Program 1.1							
Program Keluarga Berencana	Persentase peserta KB baru	81,95%	30,66%	37,42%	8.131.813.848	5.450.968.446	67,03%
	Persentase peserta KB aktif	78,40%	80,14%	102,22%			
	Persentase peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi	5,40%	0,16%	197,12%			
	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak	20,50%	19,19%	106,39%			

	terpenuhi (unmeet need)						
Program 1.2							
Program Bina Keluarga	Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)/Bina Keluarga Remaja (BKR)/Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif	70,39%	100,00%	142,07%	2.008.974.428	1.903.906.694	94,77%
	Persentase Pasangan Usia Subur yang Usia Istrinya Kurang dari 20 Tahun	3,30%	0,01%	199,64%			
Sasaran 2							
Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah	Kinerja pengelolaan sarana, prasarana, dan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	100,00%	93,87%	93,87%	4.433.187.228	4.141.167.113	93,41%
Program 2.1							
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	74,00%	86,90%	117,43%	3.355.224.719	3.173.553.726	94,59%
Program 2.2							
Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%	87,73%	87,73%	1.077.962.509	967.613.387	89,76%
Sasaran 3							
Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan program	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter perencanaan pada operasional plan	100,00%	100,00%	100,00%	207.565.555	182.070.457	87,72%
Program 3.1							
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100,00%	100,00%	100,00%	207.565.555	182.070.457	87,72%
Sasaran 4							
Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Persentase jumlah PMKS yang telah melakukan usaha ekonomi produktif	10,00%	72,20%	721,98%	6.336.960.650	5.411.826.470	85,40%
Program 4.1							
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Persentase PMKS usia produktif dari hasil pelatihan atau pembinaan yang berproduksi	75,00%	100,00%	133,33%	6.336.960.650	5.411.826.470	85,40%
Sasaran 5							

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti aktifitas pengembangan usaha di rumah kreatif	25,00%	99,36%	397,45%	510.919.120	438.774.010	85,88%
Program 5.1							
Program pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif	Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif handicraft	6,00%	7,84%	130,72%	510.919.120	438.774.010	85,88%
	Persentase rumah kreatif yang beroperasi	62,50%	87,50%	140,00%			
Sasaran 6							
Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan	Persentase Kecamatan yang belum Responsif Gender	38,71%	38,71%	100,00%	2.429.061.417	1.997.591.070	82,24%
Program 6.1							
Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase indikator PUG tingkat kecamatan yang terpenuhi	100,00%	100,00%	100,00%	2.429.061.417	1.997.591.070	82,24%
Sasaran 7							
Meningkatnya upaya perlindungan perempuan dan anak	Persentase tindak lanjut permasalahan perempuan dan anak	100,00%	100,00%	100,00%	5.311.361.696	4.810.031.275	90,56%
Program 7.1							
Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase permasalahan perempuan dan anak yang ditangani	100,00%	100,00%	100,00%	5.311.361.696	4.810.031.275	90,56%
	Persentase efektivitas pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTP2A)	66,35%	72,70%	109,57%			
	Persentase jejaring yang berperan dalam penanganan permasalahan terhadap perempuan dan anak	21,00%	100,00%	476,19%			

Hampir secara keseluruhan persentase capaian kinerja sasaran dan program melebihi dari persentase capaian realisasi anggaran, hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (capain – penyerapan)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan KB	Persentase terlaksananya pelayanan KB Kontrasepsi mantap	87,63%	72,52%	15,11%
2	Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah	Kinerja pengelolaan sarana, prasarana, dan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	93,87%	93,41%	0,46%
3	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan program	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter perencanaan pada operational plan	100,00%	87,72%	12,28%
4	Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi	Persentase jumlah PMKS yang telah melakukan usaha ekonomi produktif	721,98%	85,40%	636,58%
5	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti aktifitas pengembangan usaha di rumah kreatif	397,45%%	85.88%	311,57%
6	Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan	Persentase Kecamatan yang belum Responsif Gender	100,00%	82,24%	17,76%
7	Meningkatnya upaya perlindungan perempuan dan anak	Persentase tindak lanjut permasalahan perempuan dan anak	100,00%	90,56%	9,44%

Efisiensi penggunaan sumber daya dengan mengurangi capaian kinerja dengan penyerapan anggaran, sehingga terlihat hampir semua sasaran menunjukkan hasil yang positif artinya capaian kinerja lebih tinggi daripada penyerapan anggaran.

BAB IV
P E N U T U P

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan gambaran hasil pencapaian target indikator Tujuan dan Sasaran yang dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya tahun 2018 sebagai penjabaran dari Perencanaan Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2016 - 2021, sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya tahun anggaran 2018.

Surabaya, 29 Desember 2018

KEPALA DINAS,

CHANDRA RMD ORATMANGUN.SH.MSi

Pembina Utama Muda

NIP 196010061995032001

LAMPIRAN

MATRIKS RENSTRA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas dan Berdaya dengan Dukungan Lembaga Berbasis Masyarakat

Misi : Meningkatkan pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak

TUJUAN 1					
URAIAN	INDIKATOR		FORMULASI PENGHITUNGAN	KONDISI AWAL 2017	KONDISI AKHIR 2021
Meningkatkan pemberdayaan perempuan	1	Persentase kecamatan yang responsif gender	(Jumlah kecamatan yang responsif gender sampai dengan tahun t / jumlah kecamatan) x 100%	48,39%	100,00%

SASARAN									CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2016	TARGET TAHUN					STRATEGI	PROGRAM
				2017	2018	2019	2020	2021		
Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan	Persentase Kecamatan yang belum Responsif Gender	(Jumlah Kecamatan yang belum Responsif Gender sampai dengan tahun t : Jumlah Kecamatan) x 100%	64,52%	51,61 %	38,71 %	25,81 %	12,90 %	0,00 %	Peningkatan peran SOP dalam pelaksanaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

TUJUAN 2					
URAIAN	INDIKATOR		FORMULASI PENGHITUNGAN	KONDISI AWAL 2017	KONDISI AKHIR 2021
Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak	1	Persentase Kelurahan Ramah Anak	(Jumlah Kelurahan Ramah Anak sampai dengan tahun t / jumlah Kelurahan) x 100%	35,71%	100,00%

SASARAN									CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2016	TARGET TAHUN					STRATEGI	PROGRAM
				2017	2018	2019	2020	2021		
Meningkatnya upaya perlindungan perempuan	Persentase tindak lanjut permasalahan	(jumlah permasalahan perempuan dan anak yang		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Peningkatan peran Pusat Pelayanan Terpadu	Program perlindungan perempuan

dan anak	perempuan dan anak	ditindaklanjuti : Jumlah permasalahan perempuan dan anak yang dilaporkan) x 100%							Perlindungan Perempuan dan Anak dengan anggaran, sarana dan prasarana	dan anak

Misi : Meningkatkan kualitas pelayanan KB serta pembinaan ketahanan keluarga

TUJUAN 1					
URAIAN	INDIKATOR		FORMULASI PENGHITUNGAN	KONDISI AWAL 2017	KONDISI AKHIR 2021
Meningkatnya kualitas layanan KB dasar	1	Total Fertility Rate (TFR)	TFR = 5∑ ASFRi ASFRi = angka fertilitas menurut umur	1.80 – 1.9	1.80 – 1.9

SASARAN									CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2016	TARGET TAHUN					STRATEGI	PROGRAM
				2017	2018	2019	2020	2021		
Meningkatnya kualitas pelayanan KB	Persentase terlaksananya pelayanan KB Kontrasepsi mantap	(Jumlah Akseptor KB Baru Kontrasepsi Mantap : Jumlah Target Akseptor KB Kontrasepsi Mantap) x 100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Peningkatan kapasitas SDM dengan dukungan masyarakat dan lembaga berbasis masyarakat	Program Keluarga Berencana Program Bina Keluarga

TUJUAN 2					
URAIAN	INDIKATOR		FORMULASI PENGHITUNGAN	KONDISI AWAL 2017	KONDISI AKHIR 2021
Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik	1	Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan parasarana perkantoran	Survey	62,00%	70,00%
	2	Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program	(Jumlah program yang capaiannya lebih dari 76% tahun (t) : jumlah program tahun (t))x100%	90,84%	93,05%
	3	Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan	Survey	76,00%	80,00%

SASARAN									CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2016	TARGET TAHUN					STRATEGI	PROGRAM
				2017	2018	2019	2020	2021		
Mengelola	Kinerja	(capaian		100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan	Program

sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah	pengelolaan sarana, prasarana, dan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	indikator “persentase sarana dan parasarana perkantoran dalam kondisi baik”)x50% + (capaian indicator “tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran ”)x50%							kapasitas SDM dalam pelayanan kepada masyarakat	Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan
Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan Program	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter perencanaan pada operational plan	Rumus rata-rata persentase capaian kinerja operational plan pada aspek what (60%) dan when (40%) = (Capaian what pada sub (i) * 0,6) + (Capaian when pada sub (i) * 0,4) 2. Rumus capaian what pada sub (i) = realisasi output sub : target output sub rencana 3. Rumus capaian when pada sub (i) = (realisasi : target) sub pada bulan yang terdapat output rencana		100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Misi : Meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga dan pemberdayaan masyarakat

TUJUAN 1					
URAIAN	INDIKATOR		FORMULASI PENGHITUNGAN	KONDISI AWAL 2017	KONDISI AKHIR 2021
Memberdayakan PMKS usia produktif untuk mandiri	1	persentase PMKS usia produktif yang omzetnya ≥ 1 juta rupiah per bulan	(jumlah PMKS usia produktif yang omzetnya rata-rata ≥ 1 juta rupiah per bulan sampai dengan tahun (t) / jumlah PMKS usia produktif dari hasil pelatihan atau pembinaan yang berproduksi sampai dengan tahun (t)) x 100%	80%	80%

SASARAN									CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2016	TARGET TAHUN					STRATEGI	PROGRAM
				2017	2018	2019	2020	2021		
Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Persentase jumlah PMKS yang telah melakukan usaha ekonomi produktif	(Jumlah PMKS yang telah melakukan usaha ekonomi produktif : Jumlah PMKS yang telah dibina) x 100%		10%	10%	10%	10%	10%	Peningkatan partisipasi masyarakat berpenghasilan rendah untuk melakukan usaha ekonomi produktif	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

TUJUAN 2					
URAIAN	INDIKATOR		FORMULASI PENGHITUNGAN	KONDISI AWAL 2017	KONDISI AKHIR 2021
Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif	1	Tingkat pertumbuhan pelaku usaha kreatif	[jumlah pelaku usaha kreatif tahun (t) - Jumlah Pelaku Usaha Kreatif tahun (t0)] / Jumlah Pelaku Usaha Kreatif tahun (t0) x 100%	0,25%	0,25%

SASARAN									CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2016	TARGET TAHUN					STRATEGI	PROGRAM
				2017	2018	2019	2020	2021		
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti aktifitas pengembangan usaha di rumah kreatif	(Jumlah masyarakat yang mengikuti aktifitas pengembangan usaha di rumah kreatif : Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi) x 100%		25%	25%	25%	25%	25%	Peningkatan program pemberdayaan keluarga untuk meningkatkan mentalitas masyarakat berpenghasilan rendah	Program pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif

3. PENGUKURAN KINERJA → ESELON II

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			Capaian
				Th. 2016 (n-1)	Th. 2017 (n)	Th. 2018 (n)	
1	2	3	4	5	6		7
Meningkatnya kualitas layanan KB dasar	Meningkatnya kualitas pelayanan KB	Persentase terlaksananya pelayanan KB Kontrasepsi mantap	100,00%	106,34%	95,86%	87,63%	87,63%
Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik	Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah	Kinerja pengelolaan sarana, prasarana, dan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	93,73%	93,87%	93,87%
Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan program	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter perencanaan pada operational plan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Memberdayakan PMKS usia produktif untuk mandiri	Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Persentase jumlah PMKS yang telah melakukan usaha ekonomi produktif	10,00%	10,22%	10,00%	72,20%	721,98%
Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti aktifitas pengembangan usaha di rumah kreatif	25,00%	0%	25,00%	99,36%	397,45%
Meningkatkan pemberdayaan perempuan	Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan	Persentase Kecamatan yang belum Responsif Gender	38,71%	100,00%	51,61%	38,71%	100,00%
Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Meningkatnya upaya perlindungan perempuan dan anak	Persentase tindak lanjut permasalahan perempuan dan anak	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Penganugerahan Kota Layak Anak |AWARD|

Tahun 2011 Tingkat Madya

Tahun 2013 Tingkat Nindya

Tahun 2015 Tingkat Nindya

Tahun 2012 Tingkat Nindya

Tahun 2017 Tingkat Utama

Tahun 2018 Tingkat Utama

Penghargaan Kota Layak Anak 2018

1

2

3

4

Kegiatan Sosialisasi Dinamika Remaja 2018

1

2

3

4

Surabaya Gender Award 2018

Pokja kampung KB 2018

Baksos KB 2018